



buletin

# Parlementaria

Nomor 960/IV/V/2017 • Mei 2017

**Hak Angket KPK Harus  
Diproses Secara  
Kolektif Kolegial**

**DPR RI Diharapkan  
Miliki Museum yang  
Representatif**

**Kunjungan  
Presiden Lithuania  
Perkuat Hubungan  
Ekonomi dan  
Perdagangan**

**TIDAK  
DIPERJUAL-  
BELIKAN**

# Kunjungan Presiden Lithuania Perkuat Hubungan Ekonomi dan Perdagangan

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/05). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Presiden Lithuania ke Indonesia.

Setya Novanto menyatakan, kunjungan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite memiliki arti penting bagi penguatan hubungan bilateral kedua negara. Terlebih ini merupakan kunjungan pertama Presiden Lithuania ke Indonesia, sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1993.

"Kami melihat hubungan bilateral Indonesia-Lithuania berjalan dengan baik. Kedua negara memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan," katanya.

Meski nilai perdagangan kedua negara belum terlalu besar, jelas Politisi Golkar ini, namun pada tahun 2016 tercatat sebesar 38,6 juta US dollar. "Kami berharap nilai

perdagangan kedua negara di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan," harapnya.

Ia menjelaskan bahwa kedua negara, dengan potensi dan kelebihan masing-masing, harus dapat saling melengkapi untuk memajukan kerja sama bilateral, diantaranya kerja sama di bidang energi terbarukan.

"Untuk itu, kami sangat mengapresiasi keinginan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan Presiden Lithuania dengan Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, kerja sama antarpemerintah penting dilakukan untuk mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara. Untuk itu, kerja sama antara Parlemen

Lithuania dan DPR RI, perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

"Untuk lebih saling mengenal di antara masyarakat kedua negara, program people to people contact perlu dikembangkan, terutama melalui kerja sama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata," ungkapnya.

Presiden Lithuania tiba di kompleks Parlemen sekitar pukul 13.30 WIB. Seperti prosesi penerimaan Kepala Negara lainnya, Presiden Dalia disambut langsung di depan lobby Gedung Nusantara III oleh Setya Novanto, didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan serta sejumlah anggota DPR RI antara lain Meutya Hafidz, Trimedya Panjaitan, Syaifulah Tamliha, Azis Syamsudin dan Roem Kono. ■

(mm, dep) Foto : ijak/hr

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

# Fahri Hamzah Tinjau Penampungan TKI di Jeddah

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah meninjau kondisi dan *Shelter* (penampungan) TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. Dalam Kunjungan Kerja Muhibah tersebut, tim menyempatkan meninjau pelaksanaan *amnesty* TKI yang telah dilaksanakan sejak 2013 lalu.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah meninjau penampungan TKI di Saudi Arabia

Sepereti diketahui, amnesti tiga bulan diumumkan pada April 2013 sebelum diperpanjang oleh Raja Abdullah. Sementara untuk Amnesti 2017 yang baru saja diumumkan pangeran Mohammed bin Naif, Minggu (19/3) lalu, memberikan satu pilihan kepada ekspatriat pelanggar izin tinggal untuk meninggalkan Arab Saudi dengan dibebaskannya sanksi denda dan hukum.

Berdasarkan pemantauan di KJRI Jeddah, sampai saat inipun masih banyak para TKI yang memanfaatkan perpanjangan *amnesty* tersebut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Muhibah Fahri Hamzah menemukan masih

banyaknya TKW yang bermasalah atau kabur dari majikannya, seperti persoalan gaji yang belum dibayarkan bahkan sampai 20 tahun.

"Ini sangat aneh kenapa bisa sampai 20 tahun TKW kita tidak dibayar oleh majikannya," kata Fahri Hamzah dengan nada heran saat berdialog dengan para TKW di KJRI Jeddah, Selasa, (16/5).

Menurut Fahri, kedepan para TKI harus legal masuk ke Saudi dan untuk pembayaran gaji juga harus menggunakan sistem kontrak. "Jadi para TKI kita jangan berurusan dengan majikan tetapi asosiasi atau penyalur tenaga kerja resmi," jelasnya.

Dia menjelaskan, para TKI harus disiapkan handphone dengan aplikasi. Jadi, apabila mereka bermasalah bisa langsung lapor menggunakan aplikasi tersebut. "Jadi ada yang tidak nyambung ini, antara Kedutaan, keluarga TKI dan mereka, kenapa bisa tidak dibayar selama puluhan tahun," tegasnya.

Fahri Hamzah dan rombongan direncanakan akan bertemu dengan LSM dan masyarakat Indonesia membicarakan isu-isu aktual dalam negeri dan persoalan TKI di Saudi Arabia hari Senin malam, (16/5/) pukul 19.00 waktu setempat.

Berikut nama Delegasi Muhibah Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Saudi dan Abu Dhabi, yaitu Akbar Faisal (Nasdem), Zulfadhli (Golkar), Lalu Gede Samsul Mujahidin (Hanura), Achmad Fauzan Harun (PPP). ■

(sisi/se) Foto : Sugeng/hr

## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

## PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

## WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

## SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari

## ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko, Ria Nur Mega

## REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

## FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## ADMINISTRASI FOTO

Bagus Mudjiharjanto

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## buletin Parlementaria

Nomor 960/IV/2017 • Mei 2017

Hak Angket KPK Harus  
Diproses Secara  
Kolektif Kolegial

DPR RI Diharapkan  
Miliki Museum yang  
Representatif

Kunjungan  
Presiden Lithuania  
Perkuat Hubungan  
Ekonomi dan  
Perdagangan

TIDAK  
DIPERJUAL-  
BELKAN

## PENERBITAN

### Pimpinan Penerbitan

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

### Penanggung Jawab Produksi

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### Staf Produksi

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

### Distribusi dan Sirkulasi

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

### Koordinator

Mujiono

### Staf Distribusi dan Sirkulasi

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,

Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

## Kasus Suap PT PAL Harus Segera Dituntaskan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto mendorong agar kasus suap pengadaan dua kapal perang yang dipesan Pemerintah Filipina di PT PAL Indonesia, segera dituntaskan. Ia menegaskan, penegakan hukum harus berkeadilan.

“ Kasus suap di PT PAL ini harus segera dituntaskan. Biarlah proses penegakan hukum berlangsung, dan kita harus mendorong proses penegakan hukum berkeadilan, transparan, dan akuntabel,” tegas Agus saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).

Sebagaimana diketahui, PT PAL Indonesia melayani pembuatan dua kapal perang untuk Pemerintah Filipina. Proses pembelian yang disepakati pada 2014 tersebut melibatkan perusahaan perantara AS Ashanti Sales Inc.

Proyek pembelian dua kapal perang tersebut senilai 86,96 juta dollar AS. Diduga, pejabat PT PAL menyepakati adanya cash back dengan perusahaan perantara, dari keuntungan penjualan sebesar 4,75 persen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin sebagai tersangka.

“Kita harus mendorong bukan hanya kepada KPK, tapi juga BPK, Kepolisian, hingga Kejaksaan untuk menemukan aktor intelektual dalam kasus suap ini. Penyelidikan harus terbuka, tuntas, dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” dorong politisi F-PD itu.

Agus mengakui, pemesanan dua kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) buatan PT PAL seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia. Apalagi, hal ini merupakan kapal perang pertama yang diekspor industri dalam negeri. Namun, kebanggaan itu harus tercoreng oleh kasus dugaan korupsi.

“Seharusnya pemesanan kapal perang ini menjadi hal yang bagus. Tapi perusahaan BUMN harus memberikan good performance dan profit yang dapat dipertanggungjawabkan,” imbuah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Selain Dirut PT PAL, KPK juga menetapkan General Manager Treasury PT PAL Indonesia, Arif Cahyana dan Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Saiful Anwar sebagai tersangka. Perantara penjualan kapal dari perusahaan AS Ashanti Sales Inc Agus Nugroho juga ditetapkan sebagai tersangka.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto

Firmansyah, Arif Cahyana dan Saiful Anwar disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

dan Filipina.

Dalam penjualan, Ashanti Sales Inc akan memperoleh fee sebesar 4,75 persen dari nilai pembelian. Namun, rencananya fee tersebut akan diberikan sebesar 1,25 persen atau 1,087 juta dollar AS kepada pejabat PT PAL Indonesia. ■

(esf/se)/foto: kresno/hr

## Hentikan Stigma Anti Toleransi Sesama Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan mengajak semua pihak untuk menghentikan stigma anti toleransi sesama anak bangsa. Ia menghimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk kembali ke semangat sumpah pemuda.

“ Hentikan stigmatisasi isu anti toleransi sesama anak bangsa, itu pointnya. Jangan dilebar-lebarkan terus mengenai sikap intoleransi apapun. Kita kembali pada semangat jiwa komitmen sumpah pemuda, yakni berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Indonesia. Itu adalah komitmen nasional NKRI kita,” tandas Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/05).

Taufik mengatakan, yang menjadi sumber permasalahan adalah karena semakin tidak terkendalinya berita-berita hoax, kemudian akhirnya membuat rakyat menjadi bingung, sehingga saling memberikan rasa curiga dan prasangka yang melebar kemana-mana.

# Hak Angket KPK Harus Diproses Secara Kolektif Kolegial

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto mengatakan proses hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilaksanakan secara kolektif kolegial. Sebab, hak angket adalah kewenangan yang melekat pada setiap anggota DPR RI.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto

“ Kita adalah DPR RI, semuanya akan kita laksanakan sesuai kolektif kolegial, sehingga kalau ada usulan untuk

membatalkan hak angket, harus kita rembuk dan bicarakan secara penuh karena pembentukan hak angket pansus sudah diketok,” ungkap Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/05).

Lebih lanjut, Agus menimpali proses panitia khusus hak angket tinggal menunggu nama anggota pansus dari masing-masing Fraksi. Apakah akan dilanjutkan atau tidak, menurutnya tergantung dari keputusan dari dewan secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui, jelang pembukaan masa sidang sejumlah fraksi berbalik badan menolak usulan hak angket KPK. “Saya melihat banyak Fraksi tidak menyetujui. Jika separuhnya tidak setuju kan tidak mungkin kuorum sehingga apakah perjalanannya nanti,” tekannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI

Fahri Hamzah mengatakan KPK tidak perlu takut dan harus menghormati keputusan DPR RI. Ia berharap, nantinya, seluruh fraksi dapat mengirimkan sejumlah nama sehingga pansus bisa dibentuk.

“Bikin saja angketnya dulu, nanti ada metode rapatnya, saya yakin kalau KPK ngerti hukum maka akan ikut saja. Sebab, lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI,” urai Fahri.

Disisi lain, Fahri menyayangkan sikap KPK yang seolah-olah tidak ingin dievaluasi.

Menurutnya, kewenangan tertinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi justru berada di tangan Presiden. Presiden, lanjutnya, adalah induk dari seluruh kewenangan yang dipilih rakyat untuk mengeksekusi semua program, termasuk kampanye anti korupsi.

“Jangan KPK ambil alih donk, konsultasi sama presiden gak pernah, rapat sama presiden gak pernah. Sekarang sudah mulai konflik, karena presiden diseret-seret kan jadi kacau,” imbuhnya. ■

(ann/sc)/Foto:Runi/hr

“Artinya, sekarang ini seolah-olah kita digiring pada asumsi bahwa ada pada krisis toleransi yang terjadi di negara kita. Padahal saya sebagai Pimpinan DPR RI dan kader partai sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, dan tidak ada yang sifatnya natural dari rakyat, ini tinggal dikalangan elitnya saja,” jelasnya.

Taufik menghimbau agar menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan NKRI kepada aparat TNI dan Polri, dan menjauhkan stigmatisasi yang mengesankan adanya anti toleransi kebhinekaan di Indonesia.

“Kita harus kembali kepada semangat sumpah pemuda. Terkait dengan adanya isu penistaan agama dan sebagainya, itu konteksnya berbeda, sebab hal itu konteksnya adalah pidana,” pungkasnya. ■

(dep/sc)/foto:maefur/j/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

# Perlu Ada Dialog untuk Atasi Perbedaan Pendapat

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, beragam, bahkan rumit, sehingga tidak mungkin disederhanakan. Terlalu kompleksnya Indonesia, bukan hanya memerlukan akal yang besar, tapi juga memerlukan hati yang lebar untuk dapat saling menerima kehadiran dan eksistensi. Keberagaman itu juga memunculkan perbedaan pendapat, sehingga perlu adanya dialog yang mendalam.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Sabtu (13/5). Dialog yang bertema "Kepemimpinan Muda Yang Bersih dan Antikorupsi" itu juga dihadiri Gubernur Sulut Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, termasuk KAMMI, ratusan tokoh masyarakat, serta pemuda hingga tokoh agama.

"Bangsa kita terlalu besar, kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Maka

sebaiknya kita tempuh jalur dialog. Ini yang saya rasakan, ada perbedaan pendapat atau komunikasi yang kurang lancar. Saya berharap dapat memiliki kesempatan untuk berdialog dengan siapapun yang memiliki kecemasan atau perbedaan pendapat, karena tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak diselesaikan," kata Fahri.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu menambahkan, dengan berbagai dialog yang terus menerus dalam mengisi reformasi dan demokrasi, maka Indonesia akan mencapai soliditas yang mantap, sehingga dapat menjadi agen dari perubahan tata dunia baru yang lebih baik.

"Saya yakin, Indonesia tidak hanya bisa menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri, tapi Indonesia akan menjadi agen dunia, yang menolong bangsa lain yang miskin, kelaparan, bahkan kacau balau," imbuh Fahri.

Menutup sesi diskusi, Fahri menitipkan pesan kepada masyarakat Sulut yang ke Jakarta, jangan sungkan untuk berkunjung ke DPR RI, untuk diskusi lebih lama terutama tentang masalah-masalah kenegaraan. Karena menurutnya, menjalin silaturahmi dan membangun kekeluargaan merupakan suatu hal penting dalam memajukan NKRI tercinta.

"Saya berharap kita terus membangun



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.

dialog, pesan saya untuk warga Sulawesi Utara yang ke Jakarta bisa luangkan waktu, jangan sungkan-sungkan temui saya di DPR RI. Kita bersilaturahmi, karena saya tahu warga Sulut ramah-ramah, toleran dan menghargai pluralisme, kita harus terus merajuk kebersamaan melalui diskusi-diskusi kebangsaan seperti ini," pesan politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu.

"Bangsa ini harus berjuang bersama untuk melawan seluruh provokasi dan kebencian. Kita semua cinta Indonesia. Kita bisa berjalan bersama sebagai bangsa, karena hidup dengan semangat toleransi, kebhinekaan dan kebersamaan," tutup Fahri.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terimakasih kepada KAMMI karena telah menghadirkan Fahri Hamzah. Gubernur berharap semoga Fahri dapat berbagi gagasannya tentang Pancasila dan NKRI.

Sesi dialog ditutup dengan penukaran cenderamata, dan foto bersama. Dalam kesempatan itu, Fahri mendapat cenderamata berupa lukisan potret dirinya dari Pemprov Sulut. ■

(sif/sc)/foto:sofyan/hr



## Fadli Desak Kemhum HAM Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Lapas

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di Lapas Kelas III Gunung Sindur. Pasalnya, klinik kesehatan di Lapas masih kurang memadai.

**D**emikian diungkapkan Fadli saat meninjau Lapas Kelas III Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/5) sore.

Dia mengatakan kedatangannya ke lapas yang memiliki luas 3,5 ha ini, dalam rangka pengawasan dan juga untuk mendapatkan informasi langsung perihal situasi dan kondisi yang terjadi di Lapas Gunung Sindur.

"Secara umum dari sisi gedung dan fasilitas sudah cukup baik, tetapi ada beberapa kekurangan yang dirasakan oleh warga binaan di sini. Terutama, fasilitas klinik kesehatan yang tidak memadai," ujar Fadli usai mengelilingi area lapas.

Bahkan, tambahnya, dirinya mengaku sangat miris menyaksikan langsung kondisi napi yang terbaring sakit di lantai Lapas. "saya melihat langsung di sini, bahkan tempat tidur untuk yang sakit pun tidak ada. Padahal, ada sekitar 20-30 orang yang sakit," terangnya.

Politisi dari F-Gerindra ini berjanji akan segera mengirim surat ke Kemenkum HAM untuk segera menindaklanjuti temuannya tersebut. "Perlu ada penambahan layanan terhadap warga binaan terutama kebutuhan dasar dari para napi, tetapi hal-hal lain seperti fasilitas untuk beribadah tidak ada masalah," pungkasnya.

Dia juga menyoroti soal kurangnya petugas pengamanan dari pihak Lapas yang hanya 15 orang. "Ini walaupun belum ada kasus napi kabur, namun, ditingkatkan keamanannya untuk menjaga tahanan yang terdiri dari beberapa blok,"ujarnya.

Lapas Gunung memiliki empat blok hunian di lapas. Satu blok khusus tahanan bandar narkoba, dua blok untuk kejahatan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

umum dan satu blok dipersiapkan untuk tahanan tindak pidana korupsi.

Dalam kunjungannya, Fadli berkesempatan berbicara langsung dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, salah satu warga binaan Lapas Gunung Sindur. Saat kunjungan tersebut, Fadli juga menyempatkan mendengarkan aspirasi dan masukan Abu Bakar terkait kondisi Lapas Gunung Sindur.

Fadli mengatakan, Abu Bakar meminta kebijakan khusus untuk bisa melakukan kontak secara langsung dengan kerabat terdekatnya karena selama ini ia berkomunikasi hanya dibatasi oleh kaca. "Ini aspirasi yang nanti perlu saya diskusikan," tandas politisi dapil Jabar ini

Menurut Fadli, kondisi Abu Bakar terlihat sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit, seperti yang dikabarkan selama ini.

Komplain yang paling utama, ujar Fadli, adalah masalah kesehatan karena sebagai tahanan khusus Abu Bakar Baasyir tidak bisa dibawa ke Rumah Sakit hanya mengandalkan dokter yang datang dari Rumah Sakit Pengayoman. ■

(amv/sf)/foto:arif/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan menjadi pembicara inti di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menjadi pembicara inti dalam Stadium General dengan tajuk 'Perkembangan Politik Indonesia Kontemporer' di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).

**D**alam kuliahnya, dia mendorong agar kader-kader Muhammadiyah bisa mengambil peran penting dalam pengambilan kebijakan nasional. Di tengah situasi politik nasional yang mengalami dinamisasi, dia menekankan agar semua upaya politik harus mengedepankan kepentingan rakyat.

Politisi dari Fraksi Partai PAN ini mengatakan meskipun Muhammadiyah tidak berpolitik secara praktis, namun naluri dakwa generasi muda kader Muhammadiyah bisa mewarnai setiap unsur kehidupan sosial masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kader-kader Muhammadiyah, kita tidak boleh terjebak oleh seremonial dan retorika saja, tapi manfaatkanlah jalur konstitusional, rakyat bisa memilih dan menentukan. Meningkatkan peran dan

fungsi kader-kader Muhammadiyah menjadi bagian dari stakeholder dalam proses pengambilan keputusan," tegas Taufik di Aula Pertemuan UNIMUS, Senin (15/5).

Di hadapan para Civitas Akademika UNIMUS dia menyampaikan harapan, hendaknya para kader Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton saja dalam dinamika perpolitikan nasional. Dia mendorong agar generasi muda bangsa menjadi bagian dari solusi menghadapi masalah nasional.

"Meskipun Muhammadiyah tidak berpolitik tapi kader-kader Muhammadiyah ada di mana. Harapan yang diinginkan tidak hanya sebagai penonton, tapi juga menjadi solusi dari bangsa ini," jelas Taufik.

Selain itu dia juga mendorong agar generasi muda Muhammadiyah bisa

menjadi benteng penjaga moralitas dalam transformasi kultural. Transformasi kultural yang dia maksud adalah pesatnya kemajuan teknologi informasi yang tanpa filter.

Meskipun ada sisi positif, namun harus difilter sisi negatifnya. Menurut Taufik sisi negatif yang harus difilter adalah penyebaran konten pornografi, aksi radikalisme, judi online, dan banyak hal negatif lain yang bisa merusak generasi bangsa.

"Kemajuan teknologi informasi itu memiliki dampak negatif dari internet, online sistem, media sosial ini menjadi hal yang harus kita filter kalau tidak bisa membahayakan kehidupan sosial kita," ungkap Taufik. ■

(eko/scj)/foto.eko/hr



# Kebebasan Berpendapat Belum Disalurkan dengan Bijaksana

Presiden Joko Widodo meminta seluruh elemen bangsa untuk menghentikan perbuatan saling menghujat, saling menjelekan, saling memfitnah, saling menolak dan saling mendemo. Himpunan ini dinilai menunjukkan sikap pemerintah dalam merespons situasi dan kondisi sosial dan politik Tanah Air akhir-akhir ini.

“Memang tidak dipungkiri, momentum politik yang sejatinya mengasah kedewasaan dan kematangan kita dalam berdemokrasi, belum sepenuhnya dipersepsikan dengan baik oleh beberapa komponen masyarakat,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto, dalam pernyataan persnya kepada Parlemen, Rabu (17/5).

Politisi F-PG itu menambahkan, kebebasan bersuara dan berpendapat

mengelola perbedaan dan ragam kepentingan adalah ciri kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi,” imbuh Novanto.

Menurut Novanto, mengelola perbedaan dan ragam kepentingan inilah sebagai tantangan terbesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Memang tidaklah mudah, perbedaan lebih mudah mendefinisikan kita satu sama lain dibandingkan persamaan dan kebersamaan.

Namun demikian, tradisi luhur Indonesia telah mewariskan tentang sikap dan perilaku menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan seluruh elemen tidak boleh alergi terhadap perbedaan, melainkan memaklumi sebagai realitas yang harus diterima dan dijadikan kekuatan dalam bingkai NKRI.

“Oleh karena itu, saya mendukung segala langkah-langkah pemerintah dalam mengambil posisi yang tegas terhadap berbagai pihak yang

mengancam keutuhan bangsa dan kedaulatan NKRI. Saya juga mendukung usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka merangkul seluruh kalangan yang berbeda, baik agama, suku maupun ras untuk

senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia,” dukung Novanto.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa dari berbagai lapisan masyarakat, profesi dan keahlian, serta berbagai posisi dalam status dan kedudukan, untuk senantiasa memberi dan menularkan energi positif kepada sesama anak bangsa.

Benih-benih semangat toleransi dan persaudaraan harus ditanamkan sebagai sesama anak bangsa sehingga makna Bhinneka Tunggal Ika terpatri dalam ladang pikiran dan hati seluruh komponen bangsa ini.

“Energi itulah yang akan meminimalisir hingga menghilangkan stigma-stigma dan persepsi-persepsi yang keliru dan tidak bertanggung jawab antara sesama masyarakat, sesama warga negara dan sesama rakyat Indonesia,” tutup Novanto. ■

(sl.mp) foto: naefuraj/hr



Ketua DPR RI, Setya Novanto

terkadang disalurkan dengan cara-cara yang kurang bijaksana sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat.

Jika ini terus berlanjut, masih kata Novanto, dikhawatirkan tradisi kebangsaan dan keindonesiaan masyarakat nampak hilang dalam suasana yang terjerumus dalam berbagai perbedaan. Tatanan luhur kemasyarakatan dapat kehilangan jejak dalam situasi yang diwarnai ragam kepentingan.

“Tentu saja, kita tidak menafikan perbedaan. Kitapun tidak menutup mata atas ragam kepentingan. Namun,



<http://www.slidegenius.com>

# Peringatan Isra Miraj Sebagai Momentum Tingkatkan Kualitas Diri



Suasana Tabligh Akbar peringatan Isra Miraj yang digelar di Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI

Momentum Tabligh Akbar peringatan Isra Miraj yang digelar di Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI tidak hanya dilakukan untuk sekedar berkumpul, sebab kalau ditinjau secara kuantitatif, jumlah jamaah yang hadir cukup banyak, dan frekuensi intensitas penyelenggaraannya juga termasuk sering. Akan tetapi tingkat kualitasnya tentu akan kembali pada diri pribadi masing-masing. Sejauh apa bisa mencerna makna dan mengimplementasikannya setelah mendengarkan ceramah yang disampaikan.

**H**al itu dikatakan Inspektur Utama (Irtama) Setjen DPR RI Setyanta Nugraha dalam sambutannya pada acara peringatan Isra Miraj yang mengangkat tema "Dengan memperingati Isra dan Miraj 1438H / 2017M, Kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa". Hadir sebagai peneramah dalam acara tersebut yakni Ustadz Wijayanto.

"Oleh karena itu, momentum ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk men-charge kembali diri kita untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Kehadiran kita tidak hanya mendengarkan tetapi juga harus mencoba menghayati. Dan yang tidak kalah penting juga yakni bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup kecil keluarga, lingkungan organisasi tempat

kita bekerja, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial di masyarakat berbangsa dan bernegara," ucap Setyanta Nugraha, Senin (15/05).

Ia juga mengatakan, penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud menanamkan nilai-nilai yang telah dianut di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, yakni dalam kerangka reformasi birokrasi yang dikenal dengan istilah RAPI (Religius, Akuntable, Profesional, dan Integritas).

"Ini adalah nilai pertama yang diimplementasikan salah satunya melalui kegiatan ini. Tetapi tidak hanya sekedar itu saja, kita akan membangun integritas didalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada dilingkungan kerja kita masing-masing," ujarnya.

Secelil apapun kontribusi yang dilakukan setiap individu terhadap organisasi untuk perubahan, akan dapat meningkatkan kinerja organisasi baik secara individu maupun secara kelembagaan, lanjutnya.

"Oleh karena itu melalui majelis ini saya mengharapkan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto hendaknya benar-benar disimak, dicermati, ditelaah, dihayati dan diamalkan. Sehingga tidak ada satupun pegawai yang merasa dirinya tidak penting didalam organisasi. Oleh karenanya kontribusi terhadap perubahan kearah yang lebih baik kepada organisasi itu sangat dibutuhkan, karena akan ditemukan eksistensi dari penguatan kelembagaan di organisasi kita ini," pungkasnya. ■

(dep/so)/Foto:Anief/hr

## PMII Diharapkan Mampu Selesaikan Persoalan Kebangsaan

Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir berharap agar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mampu menjadi wahana yang solutif dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan yang kini masih menjadi persoalan di Indonesia. Hal itu disampaikan menanggapi terlaksananya Kongres PMII ke 19 yang dihadiri Presiden Joko Widodo pada Selasa, (16/05).

“Selamat dan sukses atas penyelenggaraan Kongres PMII ke 19, semoga mampu menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi negara, bangsa dan agama. Serta mampu merumuskan solusi atas persoalan2 bangsa,” ujar Dony saat dalam rilis yang diterima Parleментарaria.

Mengingat, sebelumnya isu kebhinekaan menjadi persoalan yang diperdebatkan dalam ranah publik, sehingga sebagai organisasi mahasiswa yang sudah berdiri sejak 17 April 1960 ini dituntut mampu memberikan jawaban atas persoalan kebangsaan saat ini. Politisi PPP ini menegaskan bahwa tantangan PMII kedepan adalah mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan kebhinekaan yang kini tengah dirasakan.

“Diharapkan PMII menjadi wahana yang solutif dan aplikatif untuk menyelesaikan persoalan keumatan & kebangsaan. Serta kadernya bermartabat, akhlaqul karimah, memiliki karakter, jatidiri dan integritas,” ujar Dony.

Sebagaimana diketahui, Kongres PMII ke 19 di Palu yang mengusung tema 'Meneguhkan Konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban' ini dihadiri 238 Cabang PMII se-Indonesia dan 25 pengurus koordinator cabang atau PKC setingkat provinsi/gabungan provinsi. Selain dihadiri Presiden Joko Widodo, Kongres ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet kerja. ■



Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir

(hs/sc) Foto : jaksa/hr

## BPOM Diminta Tingkatkan Pengawasan Selama Ramadhan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk meningkatkan pengawasan jelang dan selama bulan suci Ramadhan, hal tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadhan biasanya semakin meningkat dibanding bulan lainnya. Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parleментарaria, Minggu (14/5).

“Mengingat meningkatnya produksi makanan dan jajanan di bulan Ramadhan, BPOM juga harus meningkatkan pengawasan makanan dan minuman yang aman dan sehat,” ujar Zainuddin.

Selama bulan Ramadhan, lanjut Zainuddin, biasanya restoran menggelar berbagai promo untuk menarik konsumen.

Bahkan jumlah penjual jajanan ringan selama bulan puasa juga meningkat drastis.

“Banyak warga yang inisiatif menjual jajanan ringan meski sebatas untuk buka puasa atau sahur. Padahal di bulan-bulan lain mereka tidak pernah jualan. Bazar-bazar jajanan dan makanan jadi marak dan menjamur. Ini harus jadi perhatian BPOM,” ucap politisi PKS ini.

Dirinya setuju apabila selama Ramadhan, BPOM mengintensifkan pengawasan terhadap rumah makan dan para penjual makanan dan minuman. Bahkan jika perlu BPOM dapat meningkatkan sosialisasi tentang keamanan makanan dan minuman tersebut.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar selektif dalam mengkonsumsi makanan selama Ramadhan agar tetap sehat jasmani dan rohani.

“Terkait masalah keamanan makanan ini, sangat erat hubungannya dengan tujuan daripada ibadah puasa Ramadhan yang sebenarnya, yakni supaya kita menjadi sehat. Tapi biasanya, justru di bulan Ramadhan nafsu konsumtif masyarakat malah naik. Oleh karena itu masyarakat sebaiknya tetap memperhatikan hal itu, sebab selektif dalam masalah makanan membuat hidup kita semakin sehat,” pungkas Zainuddin. ■



Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Zainuddin

(dep/sc) Foto : ddk/hr



# 1950-1956 DPR SEMENTARA

## DPR Diharapkan Miliki Museum yang Representatif

Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR Lili Trisnaningih, mengharapkan DPR sebagai salah satu lembaga negara sebaiknya memiliki museum yang lebih representatif, selayaknya museum nasional. Sebab, representasi Museum DPR adalah representasi perjalanan perpolitikan bangsa Indonesia.



Banyak masyarakat yang menginginkan pemerintahan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Maka pada 1950 DPR dan Senat RIS menyetujui UUDS NKRI yang mewacanakan perubahan bentuk negara dari negara kesatuan. DPR dan Senat RIS juga membubarkan RIS dan membentuk kembali NKRI. Hal ini membuat DPR Sementara (DPRS) diisi oleh anggota dari DPR RIS dan Senat RIS, ditambah beberapa anggota Dewan Perimbangan Agung.

There were demands of many Indonesians to restore the form of government to UDR. Therefore, on August 15, 1950 the House and the Senate agreed Provisional Constitution of the UDR with a objective of creating the form of government from united states to unitary state. The House and the Senate also dissolved RIS and reconstituted the government to UDR. Consequently, Members of the Provisional House were former of Members of the House and the Senate of RIS, with some addition from Members of Working Committee of APR and the Supreme Advisory Council.



Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI, Lili Trisnainingsih

Demikian diungkapkannya dalam Forum Group Discussion Bidang Arsip dan Museum Pusat Data Informasi (PUSDATIN) dengan tema Pengembangan Tata Pamer Museum Modern di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Selasa (16/05).

Museum dinilai tidak hanya sebagai tempat menyimpan barang antik atau sebagai tempat menyimpan benda-benda masa lalu, tetapi museum memiliki peran yang multidimensi. Sejumlah pakar bahkan telah

mengangkat konsep museum terkini dengan istilah *culture supermarket* atau pasar budaya.

Sejak awal didirikan, sambungnya, museum sudah dimanfaatkan sebagai media pendidikan dan rekreasi. Namun, seiring dengan perkembangannya, fungsi museum bergeser menjadi media diplomasi, promosi daerah, bahkan sebagai media memperkuat jatidiri bangsa. "Dijamannya mungkin modern, tetapi seiring waktu berjalan memang tidak lagi modern," kata Lili.

Dengan demikian, dia menekankan, untuk mencapai museum yang modern diperlukan komitmen dari semua pihak. "Sebenarnya untuk menjadi museum modern, perlu ditambahkan sub-subnya. Namun yang terpenting dibutuhkan komitmen penuh dari politik maupun birokrasi demi terwujudnya museum modern," tegasnya.

Senada, Kepala Bidang Penyajian dan Publikasi Museum Nasional Widodo mengatakan museum DPR bisa menjadi media edukasi. Menurutnya, rakyat bisa mempelajari *history line* wajah pemerintahan Indonesia dari masa ke masa.

Museum DPR punya kekhususan yang berbeda dengan museum tempat lain, sehingga harus dikemas dengan menarik. "Jika dulu *image* museum kumuh, gelap dan menakutkan, maka sekarang harus diganti menjadi *image* pasar budaya yang modern dan informatif," terang Widodo. ■

(arn/so)/fotokresno/hr



## Antisipasi Korupsi, Ittama Sosialisasikan Pedoman *Wistleblowing System*

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal DPR RI terus bertekad dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan DPR RI. Atas tekad tersebut, Ittama melakukan sosialisasi pedoman sistem pelanggaran (*Wistleblowing System*) tindak pidana korupsi pada Selasa, (16/05). Turut serta pejabat eselon II,III dan IV sebagai peserta dalam workshop ini.

**I**nspektur Utama Setyanta Nugraha dalam kesempatan tersebut mengatakan sistem ini akan semakin memudahkan para pegawai di lingkungan Setjen DPR untuk melaporkan adanya tindak kecurangan seperti potensi korupsi atau penyimpangan moral lainnya.

"Ini semakin memudahkan dan ada keberanian terhadap para pegawai untuk melaporkan adanya tindak pidana dan kecurangan. Tak hanya penyimpangan korupsi, tapi juga masalah etika dan moral bisa disampaikan disini. Nanti kita akan lakukan verifikasi dan telaah," ujar Setyanta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Setyanta, hal ini dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Karena, lanjut Setyanta, saat ini masih terdapat 52 persen orang mengetahui adanya tindak pidana korupsi tetapi tidak berani melaporkan.

"Ini suatu ruang, termasuk teman-teman apapun yang bisa disampaikan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Ini bagian untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kalau yang pernah dibaca, ada 52 persen orang tahu adanya tindak pidana korupsi tetapi tidak berani melaporkan," jelas Setyanta.

Sehingga dengan adanya sistem ini, diharapkan akan semakin mendorong para pegawai di lingkungan DPR yang mengetahui adanya potensi tindak pidana korupsi untuk segera dilaporkan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas lembaga. "Ini satu momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun birokrasi bersih melayani," tutup Setyanta. ■



Suasana sosialisasi pedoman sistem pelanggaran (*Wistleblowing System*) tindak pidana korupsi oleh Ittama Setjen DPR RI

## Enam Provinsi Defisit Keterwakilan

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy, mengatakan ada enam provinsi yang mengalami defisit keterwakilan. Provinsi tersebut ialah Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat dan Papua.

“Setelah kita kaji ulang, ternyata ada enam provinsi dengan 19 kursi yang defisit. Ini harus diselesaikan, dilengkapi untuk memenuhi asas keadilan dan kesetaraan,” jelas politisi F-PKB ini saat ditemui Parleментарia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu sore (18/05).

Dia menilai harga kursi di ke-enam provinsi tersebut sangat mahal, satu kursi bisa setara dengan dua kali lipat perolehan suara di daerah pemilihan lain, sehingga untuk meniasati hal ini, maka diperlukan penambahan 19 kursi DPR. "Bisa ditambah, tapi kalau berat 19 kursi, maka implikasinya ada daerah yang harus dikurangi," ucapnya.

(ns/sc) Foto: Anief/hr

# Pemerintah Harus Jembatani Masyarakat Pro dan Anti Ahok

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi meminta kepada pemerintah untuk menjembatani masyarakat pro dan anti Ahok pasca penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 ini melalui dialog. Dorongan ini dilakukan usai Dede Yusuf melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung. Masyarakat yang ditemuinya pun banyak yang menanyakan situasi politik di Ibukota yang tensinya semakin meningkat.

“ Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibukota akan berimbas ke daerah lain, hal ini amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram,” ujar Dede Yusuf dalam rilis yang diterima Parlemen pada Minggu, (14/05).

Politisi Partai Demokrat ini menangkap kekhawatiran masyarakat itu, menurutnya polarisasi tajam antara komunitas masyarakat di Ibukota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan dalam hal suku atau agama. “Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa yaitu menjaga perasaan orang lain dan memposisikan diri seperti orang lain yang

bisa terluka perasaannya oleh tindak tanduk kita,” jelas Dede Yusuf.

Dede Yusuf pun meminta pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam menjembatani kedua pihak tersebut melalui dialog agar mencapai tujuan harmoni dalam persatuan. “Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial. Kondisi itu amat tidak kita harapkan, saya berharap pemerintah melakukan langkah pro-aktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog,” terangnya.

“Saya yakin dialog adalah solusi terbaik. Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi

burkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi,” sambung Dede Yusuf.

Sebagaimana diketahui, eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak berkaitan dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan. Hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan, pemerintah pun dituntut untuk turun tangan dalam meredakan suasana. ■

(ns/sc)/Foto:jay/hr



Ketua Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy

Edy menambahkan ada beberapa provinsi yang justru mengalami kelebihan kursi, diantaranya Sulawesi Selatan 4 kursi,

Sumatera Barat 3 kursi, Jawa Timur 1 kursi dan Jawa Tengah 2 kursi.

Dengan begitu, sambungnya, pansus memiliki beberapa pilihan yakni, menambah 19 kursi tanpa mengurangi jumlah kursi berlebih di daerah lain sehingga menjadi 579, atau secara ekstrem 19 kursi di daerah pemilihan lain harus dikembalikan tanpa menambah, sehingga tetap menjadi 560 kursi.

Namun, menurut Edy, hal ini tentu saja akan mengundang penolakan dari sejumlah pihak, sehingga jalan tengah yang terbaik adalah pansus akan mentolerir maksimal kelebihan 1 kursi. Misalnya, Sulawesi Selatan yang over 4 kursi, hanya perlu mengembalikan 3 kursi. Hal ini bisa dimaklumi, dengan pertimbangan peningkatan jumlah penduduk 5 tahun mendatang. “Kalau itu bisa disepakati, maka

hanya menambah 10, tidak lagi 19. Artinya, 560 menjadi 570,” paparnya.

Ia juga meminta pemerintah agar lebih matang dalam melakukan perhitungan. Keinginan pemerintah yang hanya menyetujui penambahan 5 kursi DPR dinilai tidak berlandaskan teori. “Silahkan dirasionalkan, artinya kalau pemerintah nggak mau nambah, maka daerah lain dikurangi,” tegasnya.

“Jadi jangan kita biarkan dampak defisit ini, selama ini mereka selalu bersuara tapi diabaikan. Harus diselesaikan dulu demi keadilan atas perlakuan kebijakan masa lalu yang tidak berlandaskan teori,” tandas Lukman. ■

(ann/sc) Foto : niska/hr



## Petugas Rutan Sialang Bungkok Abaikan Profesionalitas

Tim Kunspek Komisi III DPR RI tinjau Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru, Riau.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, jumlah tahanan yang lebih dari seribu orang di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru, Riau tidak sebanding dengan jumlah petugas (sipir). Disamping itu adanya aturan dan regulasi dari petugas rutan membuat para tahanan frustrasi, sehingga mudah terprovokasi oleh tahanan lainnya untuk melakukan perlawanan

“ Kejadian ini menunjukkan bahwa ada sisi profesionalitas yang diabaikan oleh petugas rutan, dan juga kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta over kapasitas,” ungkap Nasir Djamil usai meninjau Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau, Selasa (15/5).

Menurutnya, persoalan yang paling mendasar kaburnya napi karena jumlah penghuni rutan yang melebihi kapasitas. Yang seharusnya dihuni 360 orang, dipaksakan menampung 1.870 orang, belum lagi sarana dan prasarana tidak mencukupi terutama kebutuhan dasar air bersih.

“Terkait over kapasitas memang sudah menjadi problem nasional di semua rutan dan lembaga perasyarakatan. Untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana kita mengevaluasinya,” ungkapnya.

Kedatangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III ke Rutan Sialang Bungkok kali ini dalam rangka melihat bagaimana penanganan dan pengamanan pasca kaburnya ratusan narapidana di Pekanbaru. Selain itu perlu segera mencari solusi terkait pasca kaburnya para narapidana Sialang Bungkok.

“Kejadian ini harus kita evaluasi jangan sampai kemudian justru tidak menyelesaikan masalah yang ada,” ujar Nasir Djamil didampingi Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Kakanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau Dewa Putu Gede, serta Pelaksana Harian (PLH) Rutan kelas IIB Sialang Bungkok Pekanbaru Provinsi Riau.

Politisi PKS ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kapolda Riau. Ia minta lebih kurang 124 tahanan yang masih di luar agar

segera ditemukan, dan juga kepada para warga, keluarga narapidana yang kabur dihimbau untuk bisa bekerjasama. Sehingga para napi itu bisa kembali menjalani proses hukum yang dihadapi.

Lebih lanjut ia berharap agar kepada Kakanwil Kumham Provinsi Riau yang baru bisa melakukan recovery dan kemudian bisa memberikan kenyamanan ketertiban di rutan. Agar para tahanan tidak ada niatan untuk lari dari rutan.

Kepada Menpan RB, Nasir berharap moratorium pegawai ditinjau kembali. Karena untuk saat ini jumlah petugas yang ada di lapangan masih minim dan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas. Karena itu pula nanti akan segera dicarikan solusi dan dilihat dari aspek regulasi dan aspek SDM nya serta aspek pengawasannya agar kedepan tidak terjadi hal serupa. ■

(azka,mp)/Foto : Azka/hr



## Perampasan HP di Lapas Tidak Boleh Sembarangan

Anggota Tim Kunker Komisi III DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo mengingatkan, perampasan atau penyitaan HP kepada terpidana di lapas tidak boleh sembarangan apalagi sampai dimusnahkan. Pasalnya HP bagi pemiliknya sangat privacy, sangat personal sehingga bila dimusnahkan bisa menimbulkan persoalan baru bahkan berimplikasi hukum secara nasional.

**H**al itu ditegaskannya usai mengunjungi lapas wanita kelas II Mataram, Lombok NTB baru-baru ini. Saat dialog dan menyerap aspirasi para penghuninya, ada yang mengeluh HPnya dirampas oleh petugas. Padahal menurut pengakuannya dalam HPnya tersimpan data-data yang berkaitan dengan perkara yang menjeratnya.

Dossy yang juga Wakil Ketua Baleg DPR ini mengapresiasi lapas untuk pengetatan setiap orang yang masuk dan pelarangan penghuni lapas membawa HP sebagai langkah

pencegahan. Namun menurutnya HP itu sangat personal bagi pemiliknya, tidak bisa disamakan dengan kejahatan dari dalam.

Boleh dirampas tapi dibuat berita acara perampasan atau disita nanti dikembalikan setelah yang bersangkutan ke luar. Dan harus ada jaminan isinya tidak boleh keluar sebab ada UU ITE, dan kalau HP sebagai barang bukti tidak bisa dibakar atau dirusak, harus ada perlindungan hukum bagi pemiliknya.

"Kita ingin ada pembenahan tidak hanya lapas di sini tapi juga di seluruh Indonesia. Nanti akan dibicarakan dengan Kemenkumham bagaimana mekanisme



Tim Kunker Komisi III DPR RI mengunjungi lapas wanita kelas II Mataram, Lombok NTB

penyitaan HP dalam lapas. Karena akibat hukumnya berat, Pimpinan lapas bisa kena pasal penghilangan barang bukti," tandas politisi Hanura ini.

Di sisi lain, Dossy mengharapkan Kanwil Kemenkumham dan Kepala Kantor Imigrasi NTB meningkatkan pelayanan masyarakat dan supaya lebih jeli lagi kepada orang asing yang mengajukan ijin tinggal. Meski ada kebijakan bebas visa tapi kewaspadaan nasional tetap dilakukan.

Dalam pemberian ijin TKI, umroh atau haji, diingatkan jangan sampai melenceng ke perdagangan orang. "Jangan sampai rakyat kita dikorbankan untuk hal-hal seperti itu. Kita minta imigrasi sebagai garda terdepan pemberi ijin orang ke luar negeri maupun

menyaring orang luar masuk ke Indonesia, harus mempunyai pengetahuan dan wawasan pentingnya keamanan nasional dengan memproteksi dan melindungi rakyat kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkas Dossy Iskandar. ■

(mpj)/Foto:Maestur/hr

## Komisi V DPR RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Babel

Komisi V DPR RI mendorong pembangunan pelabuhan di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Dengan adanya pelabuhan ini diharapkan akan mampu menjadi akses pintu masuk ke pulau Lengkuas. Demikian disampaikan anggota Tim Kunker Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi setelah melakukan peninjauan langsung terkait persoalan infrastruktur dan transportasi ke Pelabuhan Tanjung Batu, Belitung, belum lama ini.

“Pelabuhan ini menjadi sangat penting karena itu disiapkan dermaga yang memadai, mulai dari tempat, kedalaman air, arus dan lalu lintas air dan rambu-rambu sudah siap tinggal fisik dermaganya,” ujar Yoseph.

Terkait rencana pembangunan pelabuhan ini, politisi PDI Perjuangan ini mendesak kepada pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan lahan pembangunan pelabuhan tersebut. Sementara Komisi V juga akan bersiap mendukung pembangunan tersebut dari sisi penyediaan anggaran.

“Pemerintah daerah sebaiknya segera menyiapkan lahan untuk melakukan pembangunan itu. Komisi V akan mendukung dari sisi anggaran, anggaran itu hanya bisa dilakukan kalau kesiapan tahapan pembangunan pelabuhan atau rencana induk pelabuhan sudah siap,” tutur dia.

Politisi dari Dapil Jabar ini menegaskan, Provinsi Bangka Belitung cukup menjanjikan prospeknya, sehingga pembangunan infrastruktur patut ditingkatkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun hal itu juga perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga target pembangunan di Bangka Belitung dapat tercapai.

“Belitung menjadi kawasan yang sangat menjanjikan. Tinggal kembali ke Pak Bupati, Gubernur untuk menyediakan lahannya. Saya ingin mendesak pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas, mengkonsolidasikan program dan konsep yang diusulkan ke pemerintah pusat,” jelas Yoseph.

Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan, akan berupaya untuk



Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi

menyelesaikan ketersediaan lahan yang direncanakan seluas 70 hektar ini. “Kalau lahan sudah bersertifikat, di kawasan

pariwisata nasional. Oleh karena itu, Komisi V mendorong pembangunan infrastruktur di Belitung, salah satunya adalah pelabuhan. ■

pelabuhan ada 70 hektar. Namun demikian harus dilengkapi berbagai macam dokumen yang berkenaan dengan peraturan yang ada,” ujar Sahani.

Sebagaimana diketahui berdasarkan PP No 6 Tahun 2016, Belitung adalah salah satu daerah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga diharapkan menjadi kawasan strategis

(dn,mp), foto : supardi/hr

## Komisi III Dukung Peningkatan Anggaran Kejati Sumut

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara (Sumut) mendukung peningkatan anggaran untuk Kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Bambang Sugeng Rukmono dan jajarannya, yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sumut, Rabu (03/5).

“Seperti yang diungkapkan Kajati Sumatera Utara tadi bahwa Kejati Sumut mendapat pengurangan anggaran sekitar Rp 52 Miliar untuk tahun 2017 ini, karena adanya penurunan APBN. Hal tersebut berimbas pada kinerja dari lembaga yang dipimpinnya. Misalnya satu kejaksaan negeri hanya mendapat jatah dua perkara yang harus ditangani, sementara Kejati mendapat satu perkara. Hal ini tentu sangat memprihatinkan,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring.

Padaahal, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, salah satu agenda dari pemerintahan saat ini adalah penegakan hukum atau law enforcement. Dan Jaksa sebagai penuntut umum

# Legislator Berharap Bandara Depati Amir Jadi Bandara Internasional

Mengawali kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Tim Komisi V DPR RI setibanya di bandara langsung melakukan peninjauan terkait persoalan infrastruktur dan transportasi.

**K**edatangan Tim Kunker Komisi V DPR RI di Bandara Depati Amir di sambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kadis PUPR, dan Kadis PRKP, baru baru ini.

Tim Kunker Komisi V DPR melihat kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Selanjutnya, Rombongan menuju Nam Flying School, sekolah penerbangan yang ada di Babel untuk melakukan audiensi dengan pimpinan perusahaan.

Salah satu anggota Tim Kunker Komisi V Ridwan Bae mengatakan, terkait dengan keberadaan bandara baru di Babel ada dua catatan penting yang menjadi prioritas yaitu kenyamanan dan keamanan. Kedua persoalan tersebut bersentuhan langsung dengan



Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis

elayanan publik dan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan perhubungan. "Masalah kenyamanan dan keamanan menjadi skala prioritas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat luas," ujar Ridwan

Selanjutnya, politisi Golkar ini menambahkan sarana dan prasana yang ada di bandara saat ini sudah baik, semoga ke

depan akan menjadi bandara yang bertaraf internasional. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi masyarakat Bangka Belitung menjadi maju dan pada gilirannya pembangunan di semua sektor semakin cepat tumbuh.

Pendapat yang sama disampaikan Fandi Lingga, President Director NAM Flying School dengan mengharapkan pemerintah mempermudah lembaga pendidikan ini karena tujuannya membantu pemerintah untuk bisa menghasilkan pilot-pilot berkualitas. "Jangan sampai pihak asing yang berkuasa di NKRI ini. Kita maunya mendidik anak bangsa, bahwa akhirnya pilot yang terbang di Indonesia itu adalah semua orang Indonesia," tandasnya

Kepada Tim Komisi V dia menyampaikan kendala yang dihadapi dan menyampaikan terima kasih karena para wakil rakyat tersebut telah datang melihat dan mendengar langsung keluh kesah. Secara teknis tidak terkendala, namun secara alam, sangat tergantung pada cuaca (hujan, awan, asap) yang berpengaruh pada masa pendidikan antara 10-12 bulan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis sempat mencoba simulator di Sekolah Penerbangan (Flying School) Pangkalpinang. Selain memastikan aspek keselamatan dan keamanan demi mendorong zero accident penerbangan nasional, juga sekaligus memastikan aspek peningkatan SDM calon pilot. ■

(dn.mpi) foto:supardi/hr



Anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring

merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan penegakan hukum.

Terlebih lagi, kasus terbesar yang ditangani

kejaksaan di Sumatera utara adalah kasus narkoba. Dimana para bandar narkoba tidak ragu untuk mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk membebaskan anggota atau komplotannya. Hal tersebut tentu menjadi godaan besar tersendiri bagi para penuntut umum atau jaksa. Dengan kata lain,

jangan sampai minimnya anggaran akan mengurangi kinerja jaksa sekaligus menjatuhkan moral penuntut umum.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dan Jaksa Agung dapat memberikan tambahan atau peningkatan anggaran untuk instansi tersebut. Hal itu semata demi terciptanya penegakan hukum sebagaimana salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya yang ikut dalam tim kunjungan kerja Komisi III ke Sumut, Abdul Wahab Dalimunthe menyoroti kekurangan pegawai yang dialami Kejati Sumut. Pasaunya, sejak beberapa tahun belakangan pemerintah memorandum PNS termasuk PNS yang berada di instansi hukum. Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah segera mencabut moratorium PNS khususnya untuk bidang-bidang tertentu seperti Kesehatan, Pendidikan dan Penegak Hukum. ■

(ayu/sc) Foto : Ayu/hr

# Masyarakat Diminta Ajukan Judicial Review Pasal 156a KUHP

Masyarakat yang tidak puas dengan Pasal 156a KUHP yang dianggap pasal karet, diskriminatif terkait penodaan agama, untuk me-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasal itu pada tahun 2010 dan tahun 2012 masih ditetapkan sebagai pasal penodaan agama, namun putusan MK itu bisa berubah jika masyarakat keberatan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III dari FPPP Arsul Sani dalam forum legislasi "Penghapusan Pasal 156a UU KUHP, Pasal Karet?" bersama Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

"Pasal 156a KUHP itu pada tahun 2009, 2010 dan 2012 sudah pernah digugat masyarakat sipil ke MK, dan MK pada 19 April 2010 mengeluarkan Keputusan No.140 dengan menyatakan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Hanya meminta agar norma pasal itu diperbaiki dan disempurnakan agar tidak menjadi pasal karet," tegas Sekjen DPP PPP itu.

Dengan begitu kata Arsul, Pasal 156a itu sudah tidak ada masalah. Tapi, kalau masyarakat menggugat ke MK, dan MK memutuskan lain dengan putusan MK sebelumnya, itu bisa terjadi. Seperti di Amerika Serikat soal hukuman mati pada 1971 yang diputus inkonstitusional, namun pada 1976



Anggota Komisi III DPR RI dari FPPP, Arsul Sani

diputus konstitusional karena masyarakat menggugat. Makanya 28 negara bagian AS saat ini masih menerapkan hukuman mati, dan 11 negara mengeksekusi mati.

DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi UU KUHP dan khusus

Pasal 156a ada dua kategori : yaitu apa yang dimaksud dengan penghinaan agama itu?

"Itu tergantung kepada penafsiran hakim,

dan pasal ini belum menjadi kesepakatan fraksi-fraksi DPR RI. Yaitu di Pasal 348 hingga 353 UU KUHP. Fraksi meminta merumuskan perbuatan apa yang termasuk penghinaan agama itu agar hakim tidak subyektif dan diskriminatif," ujarnya.

Hanya saja Arsul menolak kalau pasal itu dihapus. Sebab, hukum itu sebagai kendali sosial dan di negara-negara maju pun masih berlaku. "Masalah agama ini sensitif. Kalau tanpa hukum, masyarakat bisa main hakim sendiri, sehingga akibatnya akan makin buruk," pungkasnya.

Sementara itu Refly Harun menegaskan jika Pasal 156a itu bukan kitab suci, maka kalau dinilai diskriminatif seharusnya diperbaiki. Sebab, UU yang baik untuk diterapkan itu jika dalam perumusannya tidak multi tafsir dan tidak pula diskriminatif. Kalau multi tafsir berarti UU itu masih buruk, dan bisa menimbulkan otoritarianisme mayoritas atas minoritas dan sebaliknya.

"Pasal 156a itu karena Presiden Soekarno waktu itu hanya untuk mengakomodir permintaan mayoritas kelompok beragama. Sementara itu dari sisi negara, negara itu kata Refly, harus melindungi semua warga negara. Tak ada mayoritas maupun minoritas. Jadi, silakan masyarakat menggugat ke MK atas pasal 156a ini kalau dinilai diskriminatif," tegas Refly.

Menurut Refly, harus ada rumusan yang jelas dalam pasal 156a ini, karena ada kategori pertama, hatespeech (ujaran kebencian) yang sifatnya guyonan, bercanda, dan olok-olokan. Kedua, yang nyata-nyata melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti menginjak-injak kitab suci dan sebagainya. "Jangan sampai ini terjadi di Pilpres 2019 meski politik kita masih menghalalkan segala cara," pungkasnya. ■

(sc)/fotodij/hr.



<https://facultyoflawyer.files.wordpress.com>

# Perubahan Iklim Butuh Perhatian Parlemen Dunia

Isu perubahan iklim butuh perhatian parlemen dunia, terutama dalam mendorong pendanaan program tersebut untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Kerja sama parlemen dunia jadi keniscayaan untuk menggalang pendanaan aksi mengatasi perubahan iklim.

Demikian disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani saat mengikuti Regional Seminar Achieving the Sustainable Development Goals for Parliamentary in the Asia Pacific Region di Ho Chi Minh City, Vietnam, 11-13 Mei 2017. Ia hadir bersama anggota BKSAP lainnya, Siti Hediati Soeharto. Diserukan Wiryanti, parlemen harus memastikan penyediaan dana yang cukup untuk mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme regional, kata politisi PDI Perjuangan ini, juga perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim di masa depan. Ia menyampaikan hal ini saat sesi dialog mengenai Challenges, Opportunities, and

Response Action of Countries in the Region. Disampaikannya, untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia mengajak negara-negara berkembang untuk mengambil peran dalam pengurangan emisi, penyediaan dana, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas.

Selain itu, ratifikasi Doha Amandemen juga harus dilakukan untuk melanjutkan Protokol Kyoto dan merealisasikan komitmen pendanaan perubahan iklim sebesar US\$100 milyar pada tahun 2020. Pertemuan ini dihadiri 19 negara di kawasan Asia Pacific. Selain Indonesia dan Vietnam, hadir delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Singapura, Thailand, Timor Leste, Myanmar,

Filipina, Afganistan, Bhutan, Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, Maladewa, Pakistan, India, Korea Selatan, dan Vanuatu.

Seminar ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman di antara anggota parlemen dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Parlemen untuk mendukung implementasi TPB di negara masing-masing. Pada kesempatan berharga ini, Wuryanti juga menyampaikan, DPR RI akan mengadakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development pada 6-7 September 2017 di Bali. Ia berharap semua delegasi hadir dalam acara tersebut. ■

(mh)/foto: foto BKSAP/hr



Anggota BKSAP DPR RI, Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani

# PIA DPR RI Dalam Filosofi Berwudhu

Menjelang bulan suci Ramadhan Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI belajar mendalami filosofi berwudhu. Hal tersebut terungkap dalam pengajian rutin bulannya yang kali ini menghadirkan Ustad Kh. M. Bukhori Muslim, Rabu (10/5) di Masjid Baiturahman, Komplek DPR RI, Senayan Jakarta.

“Walaupun setiap hari kita lakukan, bahkan sejak kecil, namun terkadang kita tidak mengetahui makna atau filosofi dari berwudhu. Sehingga kita kerap lupa akan ritual wudhu yang sah dan baik dalam Islam. Atas dasar itulah sebelum memasuki bulan suci Ramadhan, PIA DPR RI sepakat mempelajari dan mendalami filosofi berwudhu dalam tema pengajian kali ini,” ujar Ketua Umum PIA DPR RI Deisti A. Novanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian tersebut, Annisa Rahmawati A. Malik Haramain yang mengatakan bahwa Wudhu itu merupakan

dasar dari sah dan tidaknya sholat seseorang. Sehingga sejatinya semua umat muslim yang menjalankan rukum Islam kedua itu tahu dan mengerti filosofi dari berwudhu.

“Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Kyai Bukhori Muslim yang merupakan Sekjen Lembaga Dakwah NU tadi, kita baru mengetahui bahwa setiap ritual dalam berwudhu mulai dari membersihkan tangan, mulut, wajah, kepala, telinga dan kaki ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya dimengerti oleh seluruh umat muslim yang ingin berwudhu. Dengan mengetahui dan

mengerti wudhu yang baik menurut Islam, akan semakin memantapkan ibadah sholat kita. Karena wudhu itu merupakan dasar dari sah dan tidaknya sholat seorang umat,” papar Annisa.

Baik, Deisti maupun Annisa sepakat jika pengajian rutin bulanan yang sudah diprogramkan PIA DPR RI ini ke depan diisi kajian-kajian Islami tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan mengundang ustad dan ustadzah yang notabene merupakan para pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. ■

(ayu/scj)/Foto:Humir/hr



Pengajian rutin bulanan PIA DPR RI, di Masjid Baiturahman, Komplek DPR RI



# Menjelang Ramadhan Pimpinan DPR RI Gelar Silaturahmi Dengan Seluruh Karyawan DPR RI

Ketua DPR RI Setya Novanto berharap terjalin hubungan dan sinergitas yang semakin baik antara Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian (BK) DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya di acara silaturahmi Pimpinan DPR RI menjelang bulan suci Ramadhan dengan Sekjen, Irtama, pejabat dan seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Sekretariat serta Badan Keahlian DPR RI di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

“ Sebagai supporting sistem, telah banyak yang dilakukan Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya bagi dewan. Untuk itu saya mengapresiasinya. Meski demikian, sebagaimana yang diungkapkan Sekjen DPR RI dimana sebelumnya telah melakukan survey kepada anggota dewan terhadap pelayanan yang diberikan Setjen dan BKD, maka saya berharap agar Setjen dan BKD lebih menyempurnakan dan memperbaiki lagi kerjanya. Untuk bisa mewujudkan itu semua diperlukan sinergitas

dan kordinasi yang lebih baik lagi antara keduanya,” ujar Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sementara itu, Sekjen DPR RI, Achmad Djuned dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survey tingkat kepuasan anggota DPR RI terhadap pelayanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dari sekitar 162 anggota DPR RI yang disurvei, sebanyak 74 persen menyatakan puas atas pelayanan Setjen. Sedangkan terhadap BKD, sebanyak 72 persen menyatakan puas atas pelayanan dan kinerja yang diberikan BKD.

Pada kesempatan itu, Djuned, begitu Sekjen DPR RI biasa disapa, juga melaporkan kekurangan pegawai dan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Pasalnya sejak beberapa tahun lalu pemerintah

memoratorium perekrutan PNS, padahal setiap tahun selalu terjadi pengurangan pegawai baik dikarenakan memasuki masa purna tugas, maupun alasan lain. Untuk mengatasi hal itu sejak beberapa tahun belakangan pihaknya melakukan perekrutan PTT (pegawai tidak tetap), serta pembukaan lowongan kerja bagi PNS dari instansi lain untuk berkarir di DPR RI.

Menjawab hal tersebut Ketua DPR RI mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi untuk mencabut moratorium tersebut. Tidak hanya itu, politisi dari fraksi Partai Golkar ini juga berjanji akan menggelar silaturahmi dengan seluruh karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam setiap tahunnya menjelang dan usai

keinginan pimpinan DPR RI untuk melakukan silaturahmi antara pimpinan DPR RI dengan seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI setiap tahunnya. Masukan ini sangat positif untuk meningkatkan hubungan kerja dan sinergitas serta kordinasi antara pimpinan DPR RI, dewan dan seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan DPR RI,” pungkas Sekjen DPR RI, Achmad Djuned.

Pada kesempatan itu selain Ketua DPR RI Setya Novanto dan Sekjen DPR RI Achmad Djuned, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono dan Agung Budi Santoso, serta Irtama DPR RI, Setyanta Nugraha, Deputi Persidangan Damayanti, dan Plt Deputi Administrasi, Mardian Umar. ■



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama pimpinan DPR RI dan jajaran Setjen DPR RI

b u l a n Ramadhan. Pasalnya, sejak Ketua DPR RI Kharis Suhud, praktis acara silaturahmi pimpinan DPR RI dengan seluruh karyawan DPR RI tidak pernah digelar kembali, baru di masa kepemimpinan Setya Novanto ini acara tersebut kembali diadakan.

” K a m i menyambut baik



Ketua DPR RI Setya Novanto meninjau kelengkapan fasilitas Ruang Rapat Paripurna DPR RI Kamis (18/5). Foto: Jaka

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Tabligh Akbar memperingati Isra Mi'raj 1438 H di Masjid Baiturrahman DPR RI Senin (15/5). Foto: Arief



KSDD Parlemen Indonesia bekerja sama dengan KORPRI Setjen DPR RI menggelar aksi donor di Gedung DPR, Senin (12/5), Foto : Naefuroji